

### BAB III

## TRAGEDI PKI YANG MEMUTUS SEJARAH

.....*the moment of the future becomes the present  
it is already sinking into the past..*

---Wilhelm Dilthey (1833-1911)<sup>1</sup>

### Satu Tekad untuk Kejayaan

HARI itu, 8 Maret 2008, di Sorong, Papua, --kota yang terletak di belahan paling timur Indonesia--, sebuah perhelatan sedang digelar. Hotel Marriott, hotel paling besar di Sorong—penuh dengan lautan manusia. Dihembus semilir angin di daratan Papua, ratusan orang memadati hotel ini demi menghadiri hajatan besar di kota tersebut. Mereka adalah warga Papua, namun mengaku berdarah Buton, sebuah identitas yang disandang hingga kini. Mereka menggelar reuni dan pertemuan dengan segenap keluarga besar Buton di Indonesia timur.

Dalam aula besar hotel itu, saya merasakan kebahagiaan yang terpancar di wajah masing-masing. Baik anak-anak, remaja, maupun orang tua, semuanya hadir dalam suasana yang dibalut ceria. Banyak senyum yang tersungging. Banyak wajah ramah yang menyapa sesamanya di situ. Mereka yang hadir saling berbincang satu sama lain dengan raut wajah penuh kegembiraan. Di dalam ruangan besar itu, mereka berbincang dengan beragam bahasa, mulai dari bahasa Wolio, Muna, Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, hingga Cia-Cia. Semua bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa lokal di Buton. Meski ada yang tidak memahami bahasa tersebut karena sejak kecil lahir di Papua, namun tetap saja antusias

---

<sup>1</sup> Filsuf Jerman Wilhelm Dilthey (1833-1911) menjadi tokoh penting dalam studi hermeneutika. Dilthey hidup pada masa ketika filsafat idealisme Hegel sedang jatuh dan ditumbangkan oleh positivisme. Pemikiran ilmu alam yang ditandai metode *erklaren* (eksplanasi) menjadi pemikiran yang mendominasi seluruh bangunan ilmiah. Dilthey lalu mengembangkan pemikiran tentang *verstehen* (*understanding*) sebagai bentuk gugatan pada ilmu yang terlampaui positivistik. *Verstehen* lahir dalam bingkai kritik sejarah dan ikhtiar memunculkan *human science*. Konsep Lingkar Hermeneutik adalah hubungan melingkar antara *Part* (sebagian) dan *Whole* (keseluruhan).

mendengarnya dan sesekali tertawa bersama. Saya tak pernah mendengar ada orang yang berbicara bahasa Makassar, Bugis, Jawa, terlebih lagi bahasa asli Papua. Hari itu adalah milik warga Buton perantauan<sup>2</sup>. Mereka yang hadir saling berjabat tangan erat, berpelukan, bahkan saling menangisi penuh keharuan, pertanda pertemuan yang penuh kerinduan, setelah lama tak bersua.

Apa gerangan tujuan mereka hadir di situ? Mereka sedang menghadiri seminar nasional bertemakan *Pemikiran Masyarakat Buton dan Muna Perantauan dalam Mewujudkan Provinsi Buton Raya*. Biasanya, seminar adalah bahasa ilmiah yang hanya dihadiri kalangan akademisi atau mereka yang hendak menajamkan pengetahuan atas sesuatu. Namun seminar di Sorong itu bukanlah semata milik akademisi sebab semua peserta yang hadir adalah mereka yang telah lama meninggalkan kampung halamannya dan memiliki ingatan nostalgik yang sama akan kampung halamannya. Seminar itu menjadi ajang menyatukan kerinduan bagi masyarakat Buton dan Muna di perantauan terhadap daerah asalnya, juga menyatukan komitmen dan dukungan mereka bagi pemekaran Provinsi Buton Raya terpisah dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejumlah putra ataupun keturunan Buton perantauan hadir karena digerakkan oleh ingatan kolektif orang Buton. Di antaranya adalah Wakil Gubernur Papua Barat Drs Rahimin Katjong MEd, Wakil Walikota Sorong Dra Hj Busaera, Wakil Bupati Seram Bagian Barat H La Kadir, anggota DPR Arbab Paproeka, dan anggota DPD asal Maluku Midin Lamane. Mereka adalah keturunan Buton yang sukses menjadi tokoh masyarakat di Indonesia timur. Hadir pula Walikota Bau-Bau, Drs Mz Amirul Tamim serta sejumlah intelektual atau profesor asal Buton yaitu Prof Dr Sumbangan Baja dan Prof La Pona.

Seminar yang dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Drs Rahimin Kantjong MEd menjadi forum kebangkitan Buton Raya. Rahimin menyatakan, dirinya adalah orang Papua asli tapi berbau Buton. *"Saya ini orang Papua asli, tapi berbau Buton. Makanya saya memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap masyarakat Buton. Saya mengajak seluruh masyarakat Buton yang ada di Papua Barat ikut*

---

<sup>2</sup> Untuk mengetahui lebih jauh tentang studi budaya rantau bagi orang Buton lihat Munafi, La Ode Abdul dan Tenri, Andi (2002) *"Tradisi perantauan orang Buton (Suatu kajian strukturalisme)"*. Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau.

*mensukseskan pembangunan di Papua Barat,"* katanya yang langsung disambut dengan sorak-sorai semua warga yang hadir. Semua orang sontak memberikan aplaus ketika Wagub Papua Barat itu beberapa kali menyebut nama Buton.

Aplaus itu kian nyaring terdengar ketika pembicara selanjutnya Arbab Paproeka memberikan sambutan. Pria yang lahir di Ambon, namun mengaku berdarah Binongko, pulau terjauh di Wakatobi ini, mengatakan, *"Dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Maha Esa, kita deklarasikan Provinsi Buton Raya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Buton Raya,"* kata Arbab yang disambut aplaus seluruh peserta seminar. Semua orang langsung berdiri saat memberikan tepuk tangan. Kerinduan yang berdenyut tiap saat serta harapan untuk melihat daerahnya bangkit, terasa bergema kuat dalam forum ini. Semua bahagia. Arbab yang sejak lahir hingga dewasa di Ambon dan merantau ke Jakarta telah membangkitkan satu kenangan yang nostalgik untuk melihat kembali kejayaan di kampung halaman. Meski lahir di Ambon, namun kota itu hanya menjadi persinggahan saja baginya. Ia tetap saja menyebut Buton sebagai kampung halaman dan identitas dalam interaksinya setiap hari.

Sementara itu Walikota Bau-Bau, Mz Amirul Tamim mengatakan, pemekaran Buton Raya berpisah dari Sultra adalah suatu keniscayaan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sultra di kepulauan. Menurutnya, dengan adanya pemekaran, maka akan memperpendek rentang kendali pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena selama ini dengan luasnya wilayah Sultra, apalagi terjebak pada dikotomi kepulauan dan daratan maka proses pembangunan menjadi tidak seimbang. *"Secara politik Sultra pernah dipimpin gubernur yang berasal dari kepulauan dalam waktu yang cukup lama. Tapi manfaatnya bagi pembangunan dan perkembangan bagi masyarakat tidak signifikan. Makanya memberikan kemajuan yang signifikan jalan utamanya adalah pemekaran daerah,"* kata Amirul. Sebagai bukti dukungannya dalam pemekaran Buton Raya, Amirul menyatakan, upaya pembangunan yang dilakukan di Kota Bau-bau bukan sekedar membangun bagi kebutuhan Kota Bau-bau semata, tetapi mempersiapkan Kota Bau-bau sebagai ibukota Provinsi Buton Raya.

Potensi sumberdaya di Buton Raya sangat kaya. Itu dibuktikan banyaknya kader Buton Raya yang telah menjadi guru besar di daerah lain. “*Saya juga bingung, apakah kita bodoh, atau dibodoh-bodohi, atau tidak percaya diri,*” ujar Amirul. Semua orang kembali memberikan aplaus. “*Kita semua harus pede, dan bangga bahwa kita pernah punya kesultanan yang memiliki wilayah cukup luas dan pengaruh cukup kuat di Nusantara,*” kata Amirul. Kali ini, aplaus dari peserta seminar terdengar lebih nyaring dari biasanya.

Pernyataan Amirul ini sangat menarik untuk dianalisis, apalagi jika mengamati benang sejarah Buton yang panjang. Para antropolog akan sangat tertarik mendengar pernyataan ini. Keinginan untuk melihat kembali kejayaan Buton didorong oleh ingatan kolektif bahwa Buton pernah memiliki satu kesultanan dengan wilayah yang cukup luas di Nusantara. Ingatan atas masa silam yang jaya itu mempengaruhi tindakan yang diambil oleh manusia Buton di masa kini. Seolah-olah, suara masa silam hadir kembali untuk menuntun gerak manusia di masa kini.

Berawal dari Sorong, keinginan untuk melepaskan diri dari Sulawesi Tenggara telah berpijar di sanubari kebanyakan orang Buton. Kejadian di Sorong itu hanyalah satu *events* atau titik peristiwa kecil yang kemudian diikuti sejumlah *pretext* atau peristiwa lainnya. Jalinan kejadian tersebut seakan-akan hendak mengatakan bahwa selama sekian dekade Buton seakan tenggelam di laci sejarah. Keinginan membentuk provinsi itu adalah awal dari niat besar untuk mengembalikan kejayaan Buton di masa silam. Peristiwa yang terjadi di Sorong menjadi awal dari sejumlah pertemuan besar untuk menguatkan tekad membentuk provinsi baru tersebut. Saya mencatat, pertemuan itu juga dilakukan di Kota Jakarta, Balikpapan, hingga Kota Bau-Bau sendiri.

Fenomena perantauan serta bertemunya orang Buton di banyak daerah barangkali mengisyaratkan perlunya landasan kerja bagi bagi ilmu-ilmu sosial khususnya antropologi. Selama ini, kategori etnisitas terpaku pada kategori geografis seperti tempat atau ruang. Namun, fenomena banyaknya generasi Buton di perantauan yang mencari identitas Buton dan kemudian bersatu padu menunjukkan bahwa kategori etnisitas bersifat lintas wilayah dan waktu. Etnisitas adalah sebuah

perasaan kebersatuan dengan dengan pihak lain yang didasari ingatan kolektif yang sama atas masa lalu serta masa kini.

Marcus (1998) menyatakan di akhir tahun 1980-an, ada sejumlah tanda tanya besar yang ditujukan kepada para antropolog yang kerap membuat pelukisan satu wilayah hingga mendalam.<sup>3</sup> Pelukisan yang dijerat dalam bentuk etnografi itu mendapatkan masalah ketika masyarakat secara perlahan mulai mengalami pergeseran. Imajinasi antropolog seakan-akan masih diharu-biru oleh imajinasi para penjelajah Eropa yang terobsesi menemukan masyarakat primitif untuk dianalisa dan ditekuk dalam satu kategori<sup>4</sup>. Imaji tentang penaklukan, kekuasaan, serta menemukan masyarakat primitif dan eksotik telah membimbing antropolog pada bentuk etnografi dan pelukisan hingga daging dan sum-sum masyarakat tersebut. Kini, berbagai penggambaran tersebut kian mengalami gugatan yang serius<sup>5</sup>. Masyarakat kian mengalami gerak sehingga dibutuhkan perangkat analisis baru untuk memahaminya. Jika sebelumnya sebuah masyarakat masih homogen dan bisa dikenali batasan-batasan hingga kebudayaannya secara jelas dan berbeda dengan masyarakat lain, kini persoalannya tidaklah sesederhana itu. Masyarakat primitif dan tradisional itu kian menjadi mitos yang dituturkan saat hendak lelap di malam hari, seiring dengan globalisasi yang merambah masuk hingga pada sisi terdalam dimensi kemanusiaan.

Dalam hal Buton, pertemuan di Sorong, Balikpapan, serta Jakarta, tidak memadai dijelaskan dengan pandangan yang melihat kebudayaan itu dalam satuan geografis yang membentang dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat Buton tidak lagi homogen dan terperangkap dalam kategori yang khas dan berada pada satu ruang geografis tertentu (*boundary*)<sup>6</sup>. Masyarakat kian bergerak menuju kategori tanpa tapal

---

<sup>3</sup> Lihat Marcus, George E. (1998). *Ethnography: Through Thick & Thin*. New Jersey: Princeton University Press

<sup>4</sup> Antropolog Talal Asad mencurigai formasi pengetahuan antropologi sangat bias Eropa barat dan kolonialisme. Ini menyebabkan antropologi menjadi alat bagi negara penjajah untuk menguasai daerah jajahan. Lihat Talal Asad (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter*, Ithaca: Humanities Press

<sup>5</sup> Lihat Marcus GE (1986) *Anthropology as Cultural Critique*, New Jersey: Princeton University Press

<sup>6</sup> Istilah *boundary* menggambarkan adanya batasan geografis yang membingkai sebuah masyarakat. Kebudayaan masyarakat itu masih bias dikenali dengan jelas berdasarkan letak geografis itu. Seiring dengan globalisasi dan revolusi di bidang komunikasi dan informasi, batasan itu mulai mengabur. Masyarakat mulai berkembang ke kategori *borderless society*, sehingga isu yang ada pada satu masyarakat bias jadi dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masyarakat lain. Lihat Tsing, Anna

batas (*borderless society*). Antropolog Arjun Appadurai (1994) menjadi satu dari sejumlah antropolog yang mengajukan tesis tentang pergeseran ruang dalam masyarakat<sup>7</sup>. Ia melihat adanya perbedaan lanskap maupun lingkungan sehingga menegaskan perubahan landasan kerja antropologi. Di saat kota mulai muncul dan antropologi mulai meneliti kota tahun 1970-an, maka cara kerja antropologi mulai dipertanyakan: apakah penelitian antropologi yang sebelumnya dipakai untuk meneliti masyarakat “kecil” dan homogen dapat digunakan dengan kekuatan yang sama pada saat meneliti masyarakat plural.

Kompleksitas persoalan yang kian melanda masyarakat ini membutuhkan landasan kerja baru. Persoalan yang ada pada satu masyarakat atau komunitas, tidak lahir begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ruang dan interaksi sosial kian memadat. Penjelasan terhadap gejala atau apa yang terjadi pada satu masyarakat, bisa ditelusuri dengan melihat interaksi serta dinamika yang terjadi pada berbagai level, baik lokal, nasional, maupun internasional. Pertemuan di Sorong itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa Buton tidak lagi memadat dalam definisi kepulauan. Buton sudah menjadi kategori yang cair sehingga menautkan berbagai manusia yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Buton. Persoalannya, apa yang mempertemukan mereka? Jawabannya adalah imajinasi atau ingatan kolektif tentang Buton sebagai identitas bersama. Persoalan imajinasi dan identitas ini sudah banyak dijelaskan ilmuwan sosial seperti Benedict Anderson maupun Appadurai. Jika Anderson mengatakan, etnisitas lahir dari proses membayangkan-bayangkan sesuatu, maka Appadurai (2000) menilai kategori etnis tidak semata kategori spasial (ruang), kategori etnis adalah *the structure of feeling*, semacam perasaan yang sama tentang masa lalu.<sup>8</sup> Bersetuju dengan keduanya, Buton adalah imajinasi yang mempertautkan

---

Lowenhaupt (2005) *Friction: Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press

<sup>7</sup> Senada dengan Appadurai, sosiolog Anthony Giddens menyebut globalisasi tidak sekadar pergeseran ruang. Baginya, globalisasi mengimplikasikan adanya pelipatan ruang dan waktu

<sup>8</sup> Arjun Appadurai adalah antropolog asal India yang banyak menganalisis fenomena globalisasi. Pandangannya berjangkar pada konsep imajinary atau proses imajinasi sosial. Menurutnya, imajinasi itu dibentuk dari lima dimensi mengalirnya kebudayaan global yaitu *Ethnoscapes*, *Mediascapes*,

perasaan dari sekian banyak manusia Buton baik di Pulau Buton sendiri maupun di perantauan.

Barangkali Buton bisa dilihat dengan cara pandang baru. Buton adalah kategori etnisitas yang tidak melulu dikategorikan dalam bingkai geografis. Buton sudah bertransformasi menjadi konsep yang sudah tidak memadai untuk dijelaskan dalam satu rentang geografis dengan batasan yang hanya terangkum dalam peta. Buton sudah menjelma menjadi imajinasi yang memayungi semua generasi yang mengidentifikasi dirinya memiliki asal-muasal atau keterkaitan dengan Buton di masa silam. Gejala perantauan serta terbukanya akses kepada dunia luar, menjadi awal dari masuknya orang Buton ke dalam satu kategori etnis global yang bersifat lintas wilayah. Kita akan melihat dua hal ini dengan tilikan yang lebih mendalam.

Pertemuan di Sorong itu hanyalah awal dari rangkaian pertemuan yang lain. Salah satu seminar yang paling heboh adalah seminar di Kota Bau-Bau, tanggal 4 Mei 2008 lalu. Saya ingin mengisahkan pertemuan tersebut secara detail. Pertemuan itu dihadiri oleh ribuan tokoh masyarakat serta empat pimpinan wilayah di lingkup Buton yaitu Drs Mz Amirul Tamim (Walikota Bau-Bau), Drs La Ode M Syafei Kahar (Bupati Buton), Hugua (Bupati Wakatobi), Drs H La Ode Hasirun (Sekda Buton Utara), serta La Muda Ronga (Asisten I Pemkab Muna)<sup>9</sup>. Pertemuan itu juga dihadiri elite politik yang berkiprah di pentas nasional yaitu La Ode Ida (Wakil Ketua DPD RI), La Ode Djeni Hasmar (anggota DPR RI), serta sejumlah konsultan dari Depdagri. Menurut informasi panitia, beberapa tokoh Buton di perantauan ikut hadir. Di antaranya adalah La Masikamba, tokoh Buton di Papua. Tak pelak, pertemuan itu sangat meriah dan heboh jika dibandingkan pertemuan sebelumnya.

---

*Technoscapes, Financescapes, Ideoscapes.* Istilah *scape*, digunakan untuk menggambarkan secara lebih dalam konstruksi perspektif yang ada dalam sejarah, linguistik, dan politik, yang diperankan secara berbeda oleh sejumlah aktor dalam konteks nation-state, multinasional, komunitas diasporik. Ini juga termasuk kelompok sub nasional yang berpindah-pindah seperti halnya agama ataupun ekonomi politik.

<sup>9</sup> Sayangnya, dalam pertemuan itu Muna menyatakan belum sepakat bergabung ke Buton Raya, namun daerah yang lainnya membulatkan komitmen untuk bergabung pada provinsi baru yang sudah dideklarasikan oleh sejumlah elitnya di Sorong, beberapa waktu lalu tersebut.

Pertemuan itu akan dimulai ada pukul 09.00 pagi. Akan tetapi, sejak pagi semua orang sudah datang untuk menghadirinya. Aula yang terletak di Palagimata<sup>10</sup>, kompleks perkantoran Wali Kota Bau-Bau, penuh sesak dengan manusia. Lantai dua bangunan tersebut juga penuh dengan manusia.



*Gambar 14 Kantor Walikota Bau-Bau di Bukit Palagimata, Bau-Bau*

Peserta pertemuan ini adalah seluruh *bonto*<sup>11</sup>, *parabela*<sup>12</sup>, kepala desa, kepala kampung, camat, hingga perwakilan seluruh daerah. Kebanyakan di antara yang hadir mengenakan pakaian berupa tenun khas Wolio yang kemudian dijadikan bahan baju safari.<sup>13</sup> Para *bonto* dan *parabela* mengenakan *kampurui* yang khas.<sup>14</sup> Sambil

---

<sup>10</sup> Dalam bahasa Wolio, *Palagimata* bermakna *sejauh mata memandang*. Kawasan *Palagimata* ini adalah nama dari pebukitan yang kemudian dijadikan sebagai pusat perkantoran Pemerintah Kota Bau-bau. Pebukitan itu terletak tidak jauh dari Benteng Keraton Buton. Jika berdiri di bukit itu, maka kita bisa memandang lepas ke arah laut, serta nun di kejauhan terletak Kota Bau-bau yang indah jika dilihat dari atas.

<sup>11</sup> *Bonto* adalah jabatan dalam Kesultanan Buton yang setingkat dengan Kepala Distrik. Meskipun Kesultanan Buton sudah berakhir, namun masih banyak ditemukan daerah yang dipimpin oleh Bonto hingga kini.

<sup>12</sup> *Parabela* adalah jabatan pemuka adat dalam Kesultanan Buton yang berfungsi untuk memimpin ritual atau menjalankan adat di satu wilayah. Seperti halnya *bonto*, jabatan ini masih banyak ditemukan di masyarakat Buton, padahal periode kesultanan sendiri sudah lama berakhir. Masih banyak masyarakat yang melestarikan sistem *parabela* dan *bonto* tersebut.

<sup>13</sup> Pembahasan yang lebih jauh tentang fungsi sarung dalam kebudayaan Wolio, bisa dilihat pada bahan presentasi yang tidak diterbitkan dari Dr Ruslan Rahman M.Pd berjudul Fungsi Sarung dalam Kehidupan Masyarakat Wolio. Menurutnya, posisi sarung bagi masyarakat Wolio tidak hanya

menunggu pertemuan dimulai, peserta menyaksikan *slide* pada layar besar (*giant screen*) yang menampilkan foto-foto dan gambar pada masa Kesultanan Buton. Tayangan itu seakan membangkitkan kembali kesadaran semua orang kalau di sini pernah berdiri sebuah kesultanan dengan peradaban yang telah lama dikenal dalam sejarah Nusantara. Saat acara itu dimulai, pihak pertama yang melakukan presentasi adalah Walikota Bau-Bau Amirul Tamim. Ketika memulai presentasinya, kembali Amirul mengungkapkan kebesaran sejarah Buton. ***“Bau-Bau mempunyai sejarah panjang yang merupakan bagian dari sejarah Nusantara, sejak jaman Kesultanan Buton hingga kini Bau-Bau menjadi ibukota, dengan potensinya yang melimpah ruah di kawasan ini. Maka tidak ada alasan bagi tidak berdirinya Provinsi Buton Raya dengan Bau Bau sebagai ibukota. Daerah ini sudah dikenal dalam sejarah sebagai salah satu kebudayaan tertua yang menjadi jalur perdagangan Nusantara”*** katanya yang kembali disambut dengan tepuk tangan meriah.

Sementara Bupati Buton La Ode Syafei Kahar juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Malah, di akhir penuturannya ia sempat mengutip salah satu falsafah Buton yaitu *Mendeu Yi Peelumu, Ala Yi Mendeumu* yang artinya *tolak yang engkau suka dan ambil yang kau tidak suka*. Pernyataan Syafei ini tidak saya pahami maknanya. Namun setelah membaca diktat yang disusun budayawan Buton, Moersidi, saya menemukan jawabannya di situ. Kata Moersidi, falsafah tersebut bermakna untuk mencegah keruhnya suasana dalam masyarakat, maka setiap pribadi terutama para pemimpin harus berusaha membatasi nafsunya. Ia harus bisa menerima sesuatu yang tidak diinginkannya sebab senantiasa lebih mengutamakan orang lain ketimbang kepentingan dirinya.<sup>15</sup>

---

berfungsi sebagai penutup tubuh, melainkan memiliki makna yang lain seperti strata sosial dan adanya berbagai kegiatan seperti kedukaan, perkawinan, pingitan dll. Fungsi lainnya adalah sebagai identitas etnik.

<sup>14</sup> *Kampurui* adalah ikat kepala yang khas dan menjadi aksesoris pakaian orang Buton pada masa kesultanan. *Kampurui* dibuat dari kain jenis tenun yang cara mengikatnya disesuaikan dengan strata sosial orang yang mengenakannya. *Kampurui* untuk sultan, jelas berbeda dengan yang dikenakan seorang *bonto*.

<sup>15</sup> Menurut Moersidi, pemahaman itu dipengaruhi oleh salah satu ajaran dalam tasawuf yang berkembang di Buton yaitu *“Syuhudul Kasarat Fil Wahadat, Syuhudul Wahadat Fil Kasarah,”* yang artinya *“Meneliti yang Banyak di Dalam yang Satu, Meneliti yang Satu di Dalam yang Banyak.”* Falsafah ini

## Masa Lalu untuk Masa Kini

HAL yang paling sering dikemukakan dalam berbagai pertemuan adalah kejayaan kesultanan di masa silam, serta realitas masa kini yang sangat jauh dari kejayaan tersebut. Nampaknya, generasi Buton hari ini selalu mencari idealisasi ke masa silam, demi menjawab tantangan sejarah di masa kini. Perhatikan pernyataan Wakil Gubernur Papua Barat Drs Rahimin Kantjong Med, *"Saya ini orang Papua asli, tapi berbau Buton. Makanya saya memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap masyarakat Buton. Saya mengajak seluruh masyarakat Buton yang ada di Papua Barat ikut mensukseskan pembangunan di Papua Barat."* Pernyataan ini mengandung dua nuansa sekaligus yaitu kultural dan politik. Aspek kultural adalah identifikasi asal-muasalnya sebagai Buton sekaligus mengandung muatan emosional yang kental. Sedangkan aspek politik adalah ia mengidentifikasikan dirinya pada satu etnis yang cukup besar di daratan Papua dan berpotensi memiliki suara yang signifikan dalam dinamika politik di Papua. Baik kultural dan politik adalah aspek kekinian, namun bisa dilacak sejarahnya pada masa lampau yang mengalami konstruksi ulang.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, saya termasuk pihak yang larut dan terkesima ketika sejarah masa silam itu dihamparkan. Terasa ada kebanggaan tersendiri yang mencuat ketika masa silam itu diperlihatkan. Beberapa kali bulu roma saya bergidik menyaksikan tekad yang dilambungkan tinggi tersebut. Menyaksikan pertemuan di Sorong dan Bau-Bau ini, seakan menghadirkan getar tersendiri dalam benakku. Saya larut dalam genangan emosi yang seakan menyeret saya dalam suatu gelora rasa yang menggemuruh. Tanpa sadar, saya ikut bertepuk tangan dengan keras setiap kali nama Buton disebut oleh para panelis. Saya terkesima oleh fakta begitu banyaknya orang-orang yang tetap mengaku sebagai etnis Buton, meski lahir dan besar di perantauan, tiba-tiba bertemu dalam satu forum untuk membicarakan visi

---

ditujukan kepada pemimpin agar pemerintahan berjalan dengan adil dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri.

bersama. Di saat bersamaan, warga yang ada di Buton juga membulatkan tekad yang sama.

Sebagai peneliti, agak susah memisahkan posisi atau menarik jarak dari realitas yang saya pahami. Namun, saat meninggalkan pertemuan dan saat menuliskan tesis ini, saya mulai bisa melepaskan diri dari haru-biru perasaan sebagai orang Buton yang hadir pada pertemuan itu. Saya mencatat ada dua fenomena yang menarik untuk ditelaah bersama. *Pertama*, orang Buton punya ingatan kolektif yang sama tentang masa lalu yang gemilang. Imajinasi atau angan-angan kolektif yang sama menjadi spirit yang mempertemukan mereka dalam berbagai pertemuan untuk membentuk provinsi Buton Raya dan melepaskan diri dari bayang-bayang provinsi Sulawesi Tenggara. Imajinasi tentang kejayaan kesultanan mempengaruhi bagaimana persepsi orang Buton dalam memandang kejadian di masa kini. Konsep imajinasi sejarah di sini sudah banyak dijelaskan oleh para antropolog dalam banyak etnografi. Di antaranya adalah John & Jean Comaroff yang menulis tentang *Ethnography and The Historical Imagination (1992)*.<sup>16</sup> Dalam satu masyarakat yang tercerai-berai oleh beragam asal-muasal serta kepentingan, maka imajinasi sejarah sangat penting untuk menjadi kohesi bagi masyarakat tersebut.

Kata Comaroff, imajinasi sejarah adalah konsep yang digunakan dalam memahami bagaimana terintegrasinya berbagai persepsi individu dalam satu skema interpretasi. Imajinasi sejarah memungkinkan adanya penyatuan atau integrasi ke dalam satu peta konseptual. Disebabkan “*dunia makna selalu cair dan ambigu*,”<sup>17</sup> maka pendekatan sejarah penting untuk mengeksplorasi proses-proses yang mentransormasikan perbedaan persepsi tersebut. Ingatan kolektif tentang sejarah masa lalu yang gemilang menjadi unsur penting dalam menautkan masyarakat Buton yang berada di mana-mana. Antropolog lainnya Arjun Appadurai (1996) juga menekankan imajinasi dalam analisisnya tentang ruang sosial yang terdeteritorialisasi atau melebusnya batasan sosial akibat globalisasi. Situasi dunia yang kian

---

<sup>16</sup> Saya menemukan penjelasan Comaroff dalam buku *Terror and Violence, Imagination and The Unimaginable (2006)*. Buku ini diedit Andrew Strathern, Pamela J Stewart, dan Neil L Whithead.

<sup>17</sup> ‘*The meaningful world is always fluid and ambiguous, a partially integrated mosaic of narratives, images, and signifying practices*’ (p. 30).

terdeteritorialisasi dan mengalami ketunggalan ini, telah menggiring mereka untuk menemukan kembali ide “tanah air” atau *homeland*. Deteritorialisasi atau situasi di mana dunia mengalami peleburan teritorial atau batasan itu, telah menjadi satu kekuatan utama dunia moderen yang membawa populasi berpindah dan melintasi ruang dan waktu.<sup>18</sup> Dalam berbagai pertemuan orang Buton tersebut, saya menangkap sinyal-sinyal bahwa mereka selalu mengangkat isu sejarah masa silam yang gemilang demi membangun integrasi atau penyatuan dari berbagai kelompok yang berbeda di berbagai tempat.

*Kedua*, masa lalu yang hadir di benak orang Buton mengalami pemaknaan ulang sehingga bersifat aktif dan dinamis. Masa silam tidak hadir dalam bentuk yang utuh di masa kini, namun berupa fragmen-fragmen kejayaan serta kebesaran. Sementara fragmen nestapa serta sedih seakan dikubur begitu saja dalam lautan sejarah. Para penggiat studi ingatan menyebut adanya distingsi atau perbedaan antara mengingat (*remembering*) dan melupakan (*forgetting*). Orang Buton memilih sejumlah fragmen untuk masa lalu untuk diingat sebagai tujuan di masa kini, namun secara bersamaan mereka juga melupakan sejumlah kejadian di masa lalu, demi membenarkan tujuan di masa kini. Ingatan memberikan tahu kepada kita bukan apa yang kita pilih, tetapi apa yang menyenangkan kita. Sementara, kelupaan, mengubah setiap peristiwa menjadi bukan peristiwa (*non-occurrence*). Kelupaan melenyapkan peristiwa. Tentu saja, pandangan ini masih mendasarkan dirinya pada pengandaian, bahwa ingatan adalah suatu organ yang berfungsi untuk melihat ke masa lalu, sama seperti mata adalah organ untuk melihat ke masa sekarang. Dalam arti ini, ingatan adalah suatu sumber pengetahuan, semacam mesin waktu yang memungkinkan kita bisa melihat kembali masa lalu. Jika ditelusuri lebih jauh, pandangan ini sesungguhnya berasal dari Karl Marx yang mengatakan, “*Kita hanya melihat hal-hal yang menyenangkan kita.*” Cara berpikir kita telah dibingkai (*frame*) oleh pandangan

---

<sup>18</sup> Kata Appadurai, “*Deterritorialization, in general, is one of the central forces of the modern world, since it brings laboring populations into the lower class sectors and spaces of relatively wealthy societies, while sometimes creating exaggerated and intensified senses of criticism or attachment to politics in the home-state*”. Lihat Appadurai, Arjun (2008) *Disjuncture and Difference in The Global Cultural Economy*.

berpikir tertentu hingga memaksakan kenyataan sesuai frame kita tersebut. Apa yang selalu diingat dan apa yang selalu dilupakan akan menunjukkan bagaimana orang Buton memaknai sejarahnya di hari ini serta bagaimana mereka mentransformasikan ingatan tersebut pada dinamika kekinian.

Ilmuwan sosial Clifford Geertz mengungkapkan: setiap peristiwa, kejadian, ataupun gerak berupa kedipan mata adalah simbol-simbol yang patut dianalisis sebagai gejala kebudayaan. Dalam hal sikap orang Buton yang selalu mengangkat kejayaan di masa silam bisa ditafsir sebagai upaya mereka memaknai sejarahnya dan menjadikan sejarah itu sebagai ingatan yang mempengaruhi tindakan di masa kini. Sejarah dalam historisitas (kesejarahan) orang Buton mengalami aspek baik kontinuitas maupun transformasi, sesuai dengan kepentingan para pelaku. Pernyataan dalam pidato, baliho, serta ujaran-ujaran dalam berbagai pertemuan, sarat dengan pesan ini yaitu kesinambungan masa lampau dengan masa kini yang kemudian mengalami transformasi demi pencapaian masa depan yang lebih baik. Masa silam yang dipilih untuk diingat adalah masa silam yang menyenangkan. Olick (1999) mengatakan, ingatan yang “dikumpulkan” tersebut adalah ingatan kolektif yang berisikan simbol-simbol objektif atau struktur mendalam yang mentransendensi ingatan individual. Dalam hal ini, kerangka (frameworks) sosial atau masyarakat membentuk ingatan individual. Olick mengatakan:

*“...There is no doubt, from this perspective, that social frameworks shape what individuals remember, but ultimately it is only individuals who do the remembering. And shared symbols and deep structures are only real insofar as individuals (albeit sometimes organized as members of groups) treat them as such or instantiate them in practice. It does not make sense from an individualist's point of view to treat commemorative objects, symbols, or structures as having a "life of their own": only people have lives...”<sup>19</sup>*

Historisitas masa silam atas masa kini adalah keinginan membentuk Buton Raya yang didorong oleh imajinasi atas masa silam. Masa silam adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh kondisi dan kebutuhan di masa kini. Ini selaras dengan pandangan

---

<sup>19</sup> Untuk lebih jelasnya, lihat Olick, Jeffrey K (1999) Collective Memory: The Two Culture. Dalam Sociological Theory, Vol 17 No 3, American Sociological Association

George Herbert Mead yang mengatakan, setiap konsepsi tentang masa lalu dikonstruksi dari titik berpijak masa kini. *“Every conception of the past is constructed from the standpoint of the new problem of today.”*<sup>20</sup> Pandangan ini juga sama dengan pendapat Halbwach (1941) yang mengatakan ingatan kolektif secara esensial adalah rekonstruksi atas masa lalu yang mengadaptasi gambaran fakta lama pada kepercayaan dan kebutuhan di masa kini. *“collective memory is essentially a reconstruction of the past [that] adapts the image of ancient facts to the beliefs and spiritual needs of the present”*<sup>21</sup>

Kedua pandangan ini sama-sama melihat masa lalu dipengaruhi oleh masa kini. Keduanya membangun konsep ingatan kolektif yang menghubungkan hal-hal yang diingat dalam kepercayaan, aspirasi, dan ketakutan di masa kini. Pandangan para penganut konstruksionis banyak melihat masa kini mempengaruhi konsepsi tentang masa lalu. Makanya, masa lalu tidak pernah tunggal, sebab selalu diinterpretasikan oleh manusia di masa kini dengan berbagai latar pengetahuan ataupun latar sosial kultural. Jika dibawa ke ranah metodologi penelitian, maka pendekatan emik harus lebih dominan.

*Constructionist theories of the past are rooted in a progressivist strain of social thought that defines the past as a mere burden and seeks not only to liberate the present from the past's grip (Shils 1981, pp. 1-4), but to establish "the importance of the present relative to the past". The best way to carry out this program is to make the past a fabrication that present circumstances shape. A more conservative strain of thought, however, reveals aspects of collective memory that such "radical progressivism" (Shils 1981, p. 4) ignores. ....and in Burke's view that we "derive all we possess as an inheritance from our forefathers" ([ 1790] 1940, p. 29; see also Nisbet 1978, pp. 103-5). In this reactionary light the collective memory is distorted in a different direction: It is the past that shapes our understanding of the present rather than the other way around.*

Pandangan ini banyak mengilhami para ilmuwan sosial yang melihat masa lalu bisa dijelaskan dengan cara melihat masa kini. Pandangan itu kerap disebut *“a social*

---

<sup>20</sup> *“Setiap konsepsi tentang masa lalu dibangun dari titik pijak masalah baru di masa kini.”*

<sup>21</sup> *“Ingatan kolektif secara esensial adalah sebuah rekonstruksi masa lalu yang disesuaikan dengan gambaran fakta lampau ke dalam kepercayaan dan kebutuhan spiritual di masa kini.”*

*structural past*” yang memandang masa lalu sebagai konstruksi sosial yang menggambarkan realitas maupun idealisasi di masa kini.<sup>22</sup> Situasi dan kebutuhan di masa kini telah mempengaruhi persepsi kita akan masa lalu. Pernyataan Mead, “*symbolically reconstructed past*” adalah upaya menemukan kembali makna (*redefining meaning*) secara simbolik atas masa lalu dengan cara menyusun patahan-patahan kejadian di masa kini. Pernyataan tokoh Buton seperti Wagub Papua Barat bisa dilihat dari konteks ini. Ia mengidentifikasikan dirinya dalam satu komunitas yang besar sekaligus menegaskan posisinya di masa kini. Pernyataan anggota DPR Arbab Paproeka, “*Dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Maha Esa, kita deklarasikan Provinsi Buton Raya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Buton Raya.*” Apalagi, pernyataan itu keluar menjelang momentum politik yaitu pemilihan umum di mana ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk wilayah Maluku.

Demikian pula pernyataan Amirul tentang sejarah panjang Bau-Bau. “*Bau-Bau mempunyai sejarah panjang yang merupakan bagian dari sejarah Nusantara, sejak jaman Kesultanan Buton hingga kini Bau-Bau menjadi ibukota, dengan potensinya yang melimpah ruah di kawasan ini. Maka tidak ada alasan bagi tidak berdirinya Provinsi Buton Raya dengan Bau Bau sebagai ibukota. Daerah ini sudah dikenal dalam sejarah sebagai salah satu kebudayaan tertua yang menjadi jalur perdagangan Nusantara*”.

Pernyataan Amirul diucapkan pada masa kini untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa silam. Para sejarawan yang besar dalam tradisi positivistik biasanya memiliki sejumlah perangkat metodologis untuk memverifikasi setiap pernyataan. Namun, antropologi tidak fokus pada benar-salah satu kejadian di masa lampau. Antropologi lebih fokus pada bagaimana konteks sosial dan kultural mengapa kejadian tersebut bisa terjadi di masa lampau serta bisa dipertahankan untuk diingat di masa kini. Pendekatan antropologi menginvestigasi bagaimana ingatan individual, kolektif dan sosial yang dilakukan dengan cara menganalisis simbol-simbol

---

<sup>22</sup> Pernyataan Mead saya kutip dari tulisan Schwartz, Barry (1986) *The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory* in *The Sociological Quarterly* Vol 27 No 2. Blackwell Publishing

kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana makna diproduksi, bagaimana obyek eksternal (baik museum ataupun tugu peringatan) bisa mempengaruhi dalam proses rekonstruksi masa silam. Makna masa silam muncul dan pertahankan melalui interaksi dinamik antara peristiwa sejarah dan bentuk ingatan kolektif yang mempertahankan ingatan itu hingga tetap berdenyut dalam diri individu maupun masyarakat. Antropologi akan concern pada upaya mengingat pada level kultural yang difokuskan pada pendokumentasian sejumlah simbol budaya yang membentuk isi dan makna peristiwa bersejarah itu. *The meaning of the past “emerges and is sustained through the dynamic interaction between the content of historical events and the forms of collective memory available to those intent on their preservation and public inscription”*. *Studies concerned with remembering at the cultural level generally focus on documenting the extent of cultural symbols in shaping the content and the meaning of an historical event.*

Lantas, dalam konteks apa Amirul mengungkapkan itu? Ia hendak menjawab kebutuhan politik di masa kini yaitu provinsi Buton Raya yang diyakininya kelak akan membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Buton. Ingatan kolektif tentang kebesaran masa silam itu dihadirkan untuk membangkitkan spirit kolektif demi sama-sama bergerak agar segera terwujud Provinsi Buton Raya. Masa lalu hadir dalam masa kini melalui sejumlah patahan ingatan yang merupakan konstruksi ulang. Sebagaimana lazimnya konstruksi, maka masing-masing individu boleh saja mengkonstruksikan dengan cara yang berbeda sebab dipengaruhi oleh kebutuhan masa kini yang juga berbeda.

### **Sejarah Buton yang Hendak Dilupakan**

SEBAGAI konstruksi sosial yang disusun berdasarkan situasi masa kini, manusia memiliki pilihan untuk mengingat dan melupakan sebuah peristiwa di masa lampau. Ketika hari ini orang Buton memilih peristiwa yang bernuansa kejayaan atau

kemasyhuran sebagai sesuatu yang diingat, maka di saat bersamaan, ada peristiwa yang juga hendak dilupakan dan direpresi<sup>23</sup> dalam ruang sejarah. Sebab mengingat dan melupakan adalah aktivitas sosial yang dilakukan secara bersamaan. Ketika manusia memilih mengingat sesuatu, maka di saat bersamaan ia akan melupakan sesuatu. Keduanya laksana dua sisi mata uang koin yang saling bertolak-belakang. Dengan cara berpikir demikian, maka sejarah adalah konstruksi manusia. Semacam lukisan yang tidak berniat untuk menggambarkan keseluruhan, namun hanya hal-hal tertentu dan menggambarkan bagaimana sikap pelukisnya, aliran, serta gagasan yang mendominasi benak sang pelukis. Sejarah juga tak lepas dari sisi manusia yang menyusunnya. Manusia memiliki otoritas untuk menyusun sejarah berdasarkan cara pandangnya sendiri, menyusunnya seperti sebuah lukisan, serta menyajikannya kepada khalayak lainnya.

Lantas, bagaimana orang Buton mengkonstruksi sejarah masa silamnya? Jika sejarah masa silam dipandang dari sisi ingatan masa kini, maka jejak yang tersisa jejak-jejak ingatan kejayaan. Tak banyak ruang yang tersisa bagi episode keterpurukan dalam sejarah. Keterpurukan adalah sesuatu yang hendak dilupakan dalam sejarah. Saya selalu penasaran dengan sesuatu yang hendak dilupakan ini. Dalam beberapa kali wawancara dengan informan, saya selalu menanyakan masalah ini. Jika ingatan tentang kejayaan selalu mendominasi diskursus yang mereka sampaikan, maka bagaimanakah dengan keterpurukan? Apakah ada jejak-jejak ingatan kejatuhan atau keterpurukan yang hendak dilupakan dalam sejarah?

Kebanyakan informan beranggapan apa yang terjadi di masa kini sangat jauh jika dibandingkan dengan masa lalu. Sayangnya, keterpurukan itu sama sekali tidak pernah dikemukakan secara terbuka agar orang-orang belajar untuk tidak mengulangi keterpurukan tersebut. Seorang informan mengatakan, *“Di masa lalu kita pernah mengalahkan Makassar hingga lebur<sup>24</sup>. Namun apa yang terjadi di masa kini? Makassar sudah menjadi kota besar sedangkan kita seakan tidak beranjak dan tak bisa berbuat apa-apa. Kota kita hanyalah kota kecil. Peran kita tidak banyak jika*

---

<sup>23</sup> Istilah represi di sini saya kutip secara bebas dari tuturan Sigmund Freud.

<sup>24</sup> Peristiwa yang dimaksud adalah perang Makassar ketika Raja Gowa Sultan Hasanuddin dikepung oleh sejumlah kekuatan yaitu Bugis, Buton, serta Ternate yang dibantu oleh Belanda.

*dibandingkan dengan dulu.*” Kesejarahan dimaknai sebagai semangat kejayaan yang jika diamati realitas pada hari ini sangat menyedihkan baginya. Episode heroik dalam perjalanan sejarah Buton adalah episode yang diingat sebab bisa melecutkan semangat di masa kini. Pada saat bersamaan, ingatan atas keterpurukan berusaha disingkirkan jauh-jauh seakan-akan ingatan itu bisa menjatuhkan citra dari semua orang Buton.

Untuk mengetahui keterpurukan ini, saya harus banyak melakukan wawancara (*depth interview*) dan mengikuti beragam acara. Susahnya adalah episode keterpurukan ini tidak pernah dikemukakan secara terbuka dalam pberbagai pertemuan. Seolah-olah mengangkat keterpurukan ini adalah mengangkat kembali satu luka lama yang kemudian menyakiti banyak orang di masa kini. Seorang informan lainnya La Ode Munafi beberapa kali mengutip pernyataan sosiolog Belanda bernama Paul Sarasin yang menulis Sulawesi Tenggara sebelum tahun 1950-an tidak punya arti politis kecuali Buton.<sup>25</sup>

“...Sebelum tahun 1950-an, Sulawesi Tenggara tidak punya arti politis kecuali Buton. Sayangnya, saat itu kita mulai terpuruk dan akhirnya bernasib seperti sekarang ini. Sangat jauh dari posisi yang pernah dimainkan oleh nenek moyang kita...”

Jika sejarah adalah sebuah garis lurus, maka sejarah kegemilangan itu mengalami pemutusan ketika Indonesia berdiri dan Kesultanan Buton –yang berdiri sejak 500 tahun lalu—bubar.<sup>26</sup> Episode gemilang sejarah seakan berhenti ketika bergabung

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan La Ode Munafi dilakukan pada hari Minggu, 12 Oktober 2008. La Ode Munafi dikenal sebagai sejarawan sekaligus budayawan Buton. Ia sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai seminar yang membahas tentang Buton. Saat ini ia menjadi Wakil Ketua DPRD Bau-Bau.

<sup>26</sup> Pada tanggal 15 Januari 1951, dilakukanlah *democratiseering* terhadap anggota-anggota swapraja Buton dan disaksikan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Abdul Razak Bagindo Maharaja Lelo dan disaksikan La Ode Aero (*sapati*), La Ode Mihi (*kenepulu*), La Ode Abidi (*Kapitalao Matanaeo*), La Ode Lalangi (*Raja Baadia*), La Adi (*Bontoogena Sukanaeo*). Acara ini tercatat dalam arsip Zahari (III: 1977: 128-129). Sesuai dengan pembentukan daerah tingkat I dan tingkat II di Indonesia, semua daerah dirombak, termasuk daerah-daerah yang dulunya merupakan bekas kerajaan termasuk Buton. Dalam Musyawarah Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kendari tahun 1959, ditetapkanlah Kendari sebagai ibukota Sulawesi Tenggara, serta terbentuknya Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna. Maka berakhirlah kesultanan yang sudah bertahan lebih dari 500 tahun dan telah mengarungi bahtera sejarah dalam waktu yang sangat lama.

dengan Indonesia. Sejarah Indonesia yang makro dan besar itu tidaklah menjadi episode yang diingat dalam berbagai seremoni. Pada masa silam, orang Buton menjalin hubungan internasional yang erat dengan banyak bangsa seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Namun, di masa kini, dinamika mereka hanya pada lingkup lokal dan regional. Mereka hanya mengingat kejayaan orang Buton di masa silam, ketika terjadi pertautan dengan berbagai kebudayaan. Sejarah masa silam menempatkan Buton pada posisi penting di Nusantara sekaligus memungkinkan warganya untuk berinteraksi dengan berbagai kebudayaan besar. Tradisi maritim itu memungkinkan mereka untuk berdialog dan bernegosiasi dengan bermacam manusia di berbagai kebudayaan. Namun sejak bergabung ke dalam Indonesia, orang Buton seakan terpenjara dengan segala hal yang menjadi kebijakan nasional. Konflik digeser menjadi konflik pada skala lokal yang kecil. Ketika Indonesia hadir, maka orang Buton dipaksa tunduk pada segala aturan yang ditetapkan oleh Jakarta. Mereka kehilangan otonomi dan kebebasan untuk menjalin hubungan dengan bangsa lainnya dalam satu lingkup pergaulan internasional. Mereka seakan berada pada satu ruang sejarah yang sempit, tanpa melambungkan visi sejauh-jauhnya.

Fenomena ini tidak cuma melanda orang-orang Buton saja. Pada bulan November lalu, di Kota Makassar dilaksanakan acara bedah buku berjudul *Syair Perang Makassar* yang disusun juru tulis pada masa Sultan Hasanuddin yaitu Cik Amin.<sup>27</sup> Dalam diskusi tersebut, seorang budayawan Sulsel mengatakan, “*Saya sedih karena pada masa Sultan Hasanuddin, ada tujuh negara yang membuka kedutaan atau perwakilan di sini. Tetapi sekarang, cuma ada satu yaitu Jepang. Itupun saya dengar-dengar tidak lama lagi akan dibubarkan.*”<sup>28</sup>

Artinya, pada banyak daerah yang merupakan bekas kerajaan di Indonesia timur, warganya selalu menelusuri sejarah kejayaan di masa silam demi membandingkannya dengan keterpurukan di hari ini. Sejarah menjadi satu tamasya intelektual yang memungkinkannya untuk mencari jawaban-jawaban atas segala

---

<sup>27</sup> Buku ini diterbitkan oleh Innawa

<sup>28</sup> Pernyataan ini diucapkan oleh budayawan Sulsel, SM Noor

problem dan keterpurukan di masa kini. Sejarah menjadi penjelas atau konstruksi gagasan yang merupakan refleksi atas situasi masa kini.



*Gambar15 Sultan Buton (La Ode Falihi) bersama Presiden RI (Ir. Soekarno) dalam acara pernyataan penggabungan seluruh kerajaan dan kesultanan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ujung Pandang, tahun 1950. Dari kiri ke kanan: Raja Bone, Andi Mappanyukki, Presiden RI Ir Soekarno, Sultan Buton La Ode Falihi, dan Andi Pangerang Pettarani (Gubernur Sulawesi)*

Dalam penelitian ini, saya memandang sejarah bukanlah suatu kontinuitas yang linier. Bukan pengertian sejarah dalam ranah evolusionisme, makro, komparatif seperti yang dibayangkan oleh pemikiran-pemikiran evolusionis, difusionis, maupun fungsional-struktural. Posisi pemikiran saya berada dalam ranah melihat kesejarahan dalam konteks mikro, kultural dan lebih melihat masalah keseharian (*everyday's life of people*). Sehingga kesejarahan yang saya bayangkan adalah bagaimana kondisi kultural yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu akan memproduksi interaksi yang berbeda-beda diantara kelompok-kelompok yang ada pada suatu komunitas. Kondisi kultural ini bisa saja terbentuk melalui berbagai ingatan kolektif

yang ditransformasikan melalui medium lisan maupun hadir dalam bentuk berbagai artefak yang berbentuk monumen.

Kejayaan masa silam adalah konstruksi manusia atas masa kini yang terpuruk. Sejarah masa silam menjadi oase yang sesaat bisa melegakan orang-orang ketika memandang masa kini. Tentu saja, kesejarahan yang saya maksudkan bukanlah dalam bentuk kronologi peristiwa-peristiwa, melainkan, --*meminjam konsepsi sejarah dari Foucault*-- justru terletak dalam diskontinuitas (keterputusan). Kesejarahan yang saya maksudkan lebih bertumpu kepada pemahaman dari masyarakat biasa, dan bukan kalangan elite. Kemudian Marks (1989) seperti dikutip oleh Comarrof and Comarrof (1991), menyatakan tentang berkembangnya perhatian dalam historiografi yang memberikan tekanan pada *the changing experience of ordinary people*, khususnya dalam studi tentang pengalaman kalangan masyarakat kulit hitam (*black*) yang tidak terepresentasikan dalam kekuatan kolonial dan kontrol-kontrol yang dilakukannya. Kemudian (Comarrof and Comarrof 1991) melihat hal ini sebagai suatu kemungkinan untuk menuliskan sebuah antropologi kesejarahan tentang kolonialisme di Afrika bagian selatan yang melihat pentingnya seluruh pemain dalam sebuah "permainan", motivasi apa yang mengendalikan mereka, kesadaran apa yang memberikan informasi kepada mereka dan kendala-kendala apa yang membatasi mereka

Dalam situasi kesejarahan yang seakan diperangkap dalam dinamika yang sempit itu, orang Buton menghadapi satu peta sosial yang berubah. Ketika bergabung dengan Indonesia, mereka berupaya membangun negosiasi pada sistem sosial yang berubah di banding dinamika sebelumnya. Selama riset lapangan dan pengumpulan data, saya mengkategorisasikan dua patahan sejarah yang hendak dilupakan dan tidak pernah disampaikan dalam berbagai peristiwa hari ini. Patahan sejarah ini saya temukan dengan wawancara mendalam dalam waktu yang lama serta menganalisis sejumlah dokumen. Dua peristiwa yang sering dikenang sebagai sejarah yang memutus yaitu gagalnya Bau-Bau menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara serta stigma PKI pada tahun 1969 yang kemudian berujung pada nestapa orang Buton di

pentas sejarah. Kita akan bahas peristiwa ini satu per satu demi mengetahuinya secara jelas.

Gagalnya Bau-Bau menjadi ibukota provinsi Sultra ini dianggap sebagai kabut sejarah yang merepresentasikan bentuk kekalahan orang Buton dalam kontestasi politik dengan yang lain. Kabut sejarah yang lain dan memilukan adalah stigmatisasi PKI yang dilekatkan pada Buton oleh sejumlah pihak luar, beberapa tahun setelah debat masalah ibukota provinsi. Dua hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya sejarah dan dituding generasi masa kini sebagai bentuk kekalahan orang Buton dalam kontestasi politik di tingkat regional dan nasional. Beberapa informan menyatakan bahwa elite politik Buton di masa itu hanya sibuk dengan konflik yang sifatnya internal sehingga tidak tangguh ketika berhadapan dengan dinamika eksternal.

Baik gagalnya Bau-Bau menjadi ibukota serta stigmatisasi PKI pada orang Buton adalah perkara-perkara yang sensitif dan menyakitkan bagi sebagian besar orang. Pada skala yang lebih luas, dua isu ini seakan menjadi kabut yang menghalangi cakrawala pandang orang luar terhadap Buton. Jarum sejarah seakan terhenti. Sejarah masa silam Buton tiba-tiba seakan diam di tempat akibat ketidakmampuan generasi masa kini memberikan jawaban-jawaban atas situasi yang dihadapinya. Saya sering menemui cerita tentang gagalnya Bau-Bau menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Seorang informan menuturkan seperti ini:

....”Pemilihan calon ibukota itu dilakukan berdasarkan voting di sore hari. Utusan Buton sempat ditipu dengan cara memberikan informasi palsu kalau voting akan dilakukan malam hari. Pada saat itu, delegasi Buton tidak datang saat voting karena mengira dilakukan malam hari. Ternyata, voting itu dilakukan sore dan Buton harus merelakan ibukota yang dipindahkan ke Kendari...”

Versi cerita yang disampaikan di atas adalah versi cerita yang paling populer. Banyak informan yang mengatakan hal ini. Buton dicurangi oleh daerah lainnya di Sultra yang notabene dulunya adalah wilayah protektorat atau perlindungannya. Rumor

yang beredar mengatakan kekalahan itu akibat dicurangi pihak lain sehingga impian meneruskan kejayaan itu kemudian terhenti. Jarum sejarah seakan terhenti. Mulanya, Bau-Bau adalah ibukota afdelling Sulawesi Timur, kemudian saat Belanda henggang dari Indonesia, Bau-Bau menjadi ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara yang bernaung dibawah naungan Sulawesi Selatan. Saat kabupaten itu dimekarkan menjadi provinsi, justru nama Bau-Bau seakan lenyap dan tidak menjadi ibukota.

Semuanya dimulai tatkala Kesultanan Buton berakhir. Berakhirnya kesultanan mengharuskan orang Buton untuk beradaptasi dengan peta sosial baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sistem sosial baru ini mensyaratkan penguasaan pada pengetahuan moderen serta negosiasi atau kemampuan membangun strategi dengan bangsa lainnya. Kontestasi politik yang dulunya dirangkum dalam dinamika lokal melalui struktur sosial *kaomu-walaka-papara*,<sup>29</sup> perlahan bergeser dengan struktur sosial baru. Dalam hubungannya dengan kekuatan luar, orang Buton harus belajar banyak sebab pada tahun 1952, kekuasaan kesultanan telah digeser menjadi Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibukota Bau-Bau. Kabupaten ini adalah satu dari tujuh kabupaten yang berada di bawah lingkup Sulawesi Selatan. Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi wilayah afdelling Buton dan Laiwui.<sup>30</sup> Selama periode Kabupaten Sultra ini, tercatat ada lima orang yang menjadi bupati di kabupaten yang berkedudukan di Bau-Bau ini yaitu Achmad Marzuki Daeng Marala asal Sulsel, R Pusadan (asal Sulut), Abdul Madjid Pattaropoera (asal Sulteng), Muh Amin Daeng Soero (asal Sulsel), Laode Manarfa (asal Buton).

Kabupaten baru ini kemudian menjadi arena konflik bagi empat etnis besar yang ada di situ. Pada masa inilah, peta politik antara wilayah daratan dan kepulauan mulai mencuat dan punya jejak hingga ke masa kini. Konflik mulai membunyah ketika sejumlah warga Kendari hendak mendeklarasikan berdirinya Kabupaten Sulawesi Timur dan melepaskan diri dari Kabupaten Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 24 Agustus 1952, mereka mendesakkan keinginan agar bekas Kewedanaan Kendari serta Kolaka menjadi Kabupaten Sulawesi Timur. Rapat dan deklarasi rakyat

---

<sup>29</sup> Untuk mengetahui kajian tentang *kaomu*, *walaka*, dan *papara*, baca tulisan Tony Rudyansjah pada bagian lain buku ini

<sup>30</sup> Pembentukan tujuh kabupaten ini dikukuhkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1952

digelar demi memuluskan ide terbentuknya kabupaten baru itu. Suasana saat itu sangat heboh sebab selalu terjadi demonstrasi serta rapat rakyat.

Saat itu, warga Buton tidak mempermasalahkan keinginan itu, namun mereka sempat berang dan marah ketika Kendari hendak mencaplok tiga wilayah yaitu Poleang Bugis, Poleang Moronene, dan Rumbia –yang sejak dulu menjadi lumbung beras Kesultanan Buton. Permintaan itu kemudian dibahas dalam rapat DPRDS dan akhirnya disetujui pembentukan kabupaten dengan catatan tiga wilayah itu tetap di bawah Kab Sultra di Bau-Bau. Belakangan terjadi konflik antara Kendari dan Kolaka sehingga gagasan kabupaten baru itu tidak sempat terealisasi.<sup>31</sup> Namun, upaya ini telah mendorong Muna untuk juga melakukan perjuangan agar dibentuk Kabupaten Muna.<sup>32</sup> Dalam beberapa kali dialog yang alot dengan pihak Kab Sultra di Bau-Bau, akhirnya disetujui pembentukan kabupaten ini untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Kian maraknya tuntutan ini, membuat Kepala Daerah Sulawesi Tenggara akhirnya membicarakan persoalan ini dengan Gubernur Sulawesi pada tanggal 8 November 1957. Konflik yang berlarut-larut tersebut harus segera diselesaikan. Secara internal, terdapat pula konflik antara pihak Kewedanaan Muna dan Swapraja Buton – yang menaganggap Muna sebagai wilayahnya. Akhirnya, Buton menyetujui permintaan Muna pada bulan April 1958.

Tuntutan dari sejumlah kabupaten untuk mekar, membuat Kabupaten Sultra mengajukan usulan tersebut kepada pusat. Gayung bersambut ketika pemerintah pusat menyetujui usul tersebut dan mengeluarkan Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang pembentukan empat daerah otonom serta kepala daerahnya yaitu Buton (dipimpin La Ode Abdul Halim), Muna (La Ode Abdoel Koedoes), Kendari (Drs Abdullah Silondae), dan Kolaka di bawah pimpinan Jacob Silondae. Sebagai realisasi pembentukan kabupaten ini, maka selanjutnya diadakanlah acara penyerahan

---

<sup>31</sup> Untuk mengetahui lebih jauh peristiwa ini, baca Said D (1997) Pembentukan Propinsi di Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi. Tesis Universitas Indonesia (tidak dipublikasikan).

<sup>32</sup> Tanggal 5 Agustus 1956, wilayah Muna yang dipelopori Panitia Penuntut Kabupaten Muna di Makassar, mencetuskan keinginan rakyat Muna untuk menjadi kabupaten

kekuasaan dari Bupati Sulawesi Tenggara Drs La Ode Manarfa kepada bupati empat kabupaten, dan disaksikan Gubernur Sulselra Andi pangerang Pettarani.<sup>33</sup>

Terbentuknya empat kabupaten ini tidak membuat persoalan berhenti sampai di situ. Banyaknya kabupaten yang bernaung di bawah Sulawesi Selatan yaitu 27 kabupaten, menjadikan rentang kendali birokrasi serta pembangunan menjadi sukar dikontrol. Gagasan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur kembali digaungkan. Belakangan, nama provinsi ini berubah menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah melalui dialog dan diskusi yang intens dengan Gubernur Sulselra A Rifai dan Pangdam IV Hasanuddin, M Yusuf, akhirnya diusulkanlah provinsi baru ini ke pemerintah pusat yang selanjutnya ditetapkan melalui Perpu No 2 Undang-Undang No 13 Tahun 1964. Penetapan ini juga diikuti dengan keputusan bahwa ibukota provinsi baru ini terletak di Kendari.<sup>34</sup>

Membaca catatan tentang peristiwa ini,<sup>35</sup> sangat terlihat bahwa orang Buton selalu bisa mengakomodasi keberagaman dan perbedaan pendapat. Bangsa Buton selalu menempatkan urusan kemaslahatan warga sebagai tujuan dari segala tindakan manusia sebagaimana tercermin dalam semboyan *bolimo karo somanamo lipu*.<sup>36</sup> Dalam kasus konflik dengan atau tuntutan bangsa lain, bangsa Buton selalu berupaya mengembalikan debat tersebut pada konteks orang banyak. Sayangnya, ini bisa menjadi celah ketika melakukan negosiasi. Sehingga meskipun secara ekonomi dan kultural, Bau-Bau adalah pusat kegiatan pada masa itu, namun secara politik, Bau-Bau tidak didukung oleh militer, yang saat itu mendominasi iklim perpolitikan. Sejarah seakan ditarik mundur ke belakang, tanpa ada sedikitpun reaksi dan nuansa

---

<sup>33</sup> Sesuai instruksi Mendagri No 1/PD/ 29 September 1959, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara La Ode Manarfa menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kepada kepala daerah terpilih.

<sup>34</sup> Sistem politik pada saat itu sangat didominasi oleh militer. Sehingga masuknya seorang anggota militer yakni Kolonel Edy Sabara dalam tim sangat mempengaruhi gagasan pemekaran. Edy Sabara adalah Komandan SOB Sulawesi Tenggara mengusulkan Kendari dikarenakan faktor keamanan sebab banyak tempat di wilayah itu yang jadi sasaran kegiatan DI/TII pimpinan Qahhar Mudzakkar. Di kalangan tim pemekaran terbagi dua kelompok berupa daratan yaitu Kendari dan Kolaka (yang didukung Edy Sabara) serta kubu kepulauan yaitu Buton dan Muna.

<sup>35</sup> Selain sejumlah arsip, saya mendasarkan pada studi Said D tentang pembentukan Sulawesi Tenggara

<sup>36</sup> *Bolimo karo somanamo lipu* bermakna jangan mementingkan kepentingan diri, namun utamakanlah kepentingan orang banyak. Sejak masa Orde Baru hingga kini, seemboyan ini ditulis dalam baliho besar dan dipasang di depan Pelabuhan Murhum Bau-Bau

protes atas kebijakan tersebut. Gagalnya Bau-Bau menjadi ibu kota ini menjadi catatan penting dalam menafsir perkembangan kota ini ke depan.

Pengalaman dan jejak kesejarahan yang panjang serta dinamika orang Buton di pentas sejarah nasional, seakan-akan terabaikan hanya karena persoalan pemilihan tersebut. Peristiwa ini menjadi catatan pertama tentang perlunya mengasah kemampuan negosiasi dengan kekuatan lain di era modern. Tingginya keragaman dan dinamika politik yang ada di tanah Buton membuat masyarakatnya hanya sibuk berpolitik dan melancarkan siasat dengan sesama masyarakatnya, sehingga ketika harus berhadapan dengan kekuatan luar dalam lingkup regional, tampaknya bangsa ini masih harus banyak belajar. Saya menduga gerak politik orang Buton lebih suka dikalahkan kekuatan lain ketimbang kelompok dalam bangsa sendiri. Namun asumsi ini harus didukung dengan satu penelitian yang mendalam tentang karakter orang Buton.

### **Tragedi PKI 1969: Dialektika Proses Mengingat dan Melupakan**

PERISTIWA yang dianggap paling memilukan serta hendak dilupakan bagi orang Buton adalah stigma negatif yang seolah menyatakan Buton adalah basis PKI pada tahun 1969. Peneliti Jepang, Hiroko Yamaguchi, juga menilai peristiwa ini sebagai peristiwa paling gelap dalam sejarah orang Buton.<sup>37</sup> Hampir tidak ditemukan satu studi yang mendalam tentang peristiwa ini. Schoorl yang melakukan studi lapangan pada tahun 1980-an, juga tidak mencatat peristiwa PKI tersebut. Sementara peneliti yang belakangan hadir, mencatat peristiwa itu secara singkat. Misalnya Yamaguchi,<sup>38</sup> Blair (2000), Rudyansjah (2008). Yamaguchi menyebut peristiwa itu secara sekilas dengan kalimat, "*peristiwa paling gelap bagi orang Buton di masa modern.*" Blair hanya menyebut bahwa Buton pernah dicap sebagai "basis PKI." Sedangkan

---

<sup>37</sup> Pernyataan Hiroko ini saya baca dalam draft penelitiannya di Buton, sebagaimana dikoleksi Tasrifin.

<sup>38</sup> Pernyataan ini saya dapatkan melalui korespondensi dan diskusi dengan Hiroko Yamaguchi. Beliau pernah melakukan penelitian antropologi di Buton. Saat ini, ia menjadi pengajar di International University of Okayama di Jepang.

Rudyansjah (2008) banyak menyinggung soal ini untuk menjelaskan dinamika kekuasaan yang terjadi di Buton. Meskipun semua analisis itu tidak spesifik menganalisis tragedi PKI di mata orang Buton, namun analisis mereka sangat membantu sebagai *guiding hypotesis* dalam penulisan tesis ini. Catatan mereka bisa memberikan kita kedalaman pada gejala yang hendak dipahami.

Bagaimanakah orang Buton hari ini menandang kejadian tersebut? Baiklah, kita lihat penggalan tulisan dari salah satu cendekiawan Buton, Kamaluddin<sup>39</sup>, sebagaimana ditampilkan di bawah ini:

Ratu Kleopatra yang terkenal cantik, cerdas, dan pemberani tidak pernah gentar menghadapi musuh bahkan sekalipun lawan telah menghabiskan hampir seluruh harta, tentara, keluarga, dan kerabatnya. Tetapi ketika perpustakaan dibakar, iapun jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Sebelum pingsan sempat ia berteriak histeris, “Habis dan hancurlah bangsa Mesir”. Para ahli sejarah mengibaratkan hancurnya perpustakaan tersebut sebagai pukulan telak yang meng-knock out seluruh masyarakat dan peradaban Mesir. Begitu dahsyatnya pukulan tersebut hingga sampai saat ini bangsa Mesir belum sadar dari pingsannya.

Saya berasumsi bahwa fenomena atau tragedi tersebut memiliki kemiripan dengan apa yang telah terjadi di Tanah Buton, khususnya di ibu kota Kabupaten Buton (Bau-Bau) di penghujung tahun 1960-an. Sebagai kota yang paling strategis di kawasan Timur Indonesia, Bau-Bau pernah menjadi ibu kota Sulawesi Tenggara dan menjadi rahim lahirnya beberapa perguruan tinggi di propinsi tersebut. Ditengarai bahwa telah terjadi upaya yang dilakukan secara perlahan tapi pasti dan dilakukan secara sistematis serta terencana untuk menjadikan Bau-Bau sebagai kota yang mempunyai citra negatif. Satu persatu baik rakyat maupun para tokoh intelektual lokal yang berlevel nasional, bahkan pucuk pimpinan sang Bupati, dipenjarakan dan akhirnya disingkirkan dengan label PKI.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kamaluddin lahir di Buton, 10 April 1966. Saat ini, beliau berprofesi sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Haluoleo, Kendari. Beliau menamatkan pendidikan dari SD hingga SMA di Kota Bau-Bau, kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Haluoleo dan pendidikan Diploma TEFL di Regional Language Center (RELC) di Singapura. Pendidikan magisternya pada bidang Applied Linguistics dilalui di Universitas Negeri Malang (2002). Beberapa tulisannya pernah dipublikasikan baik di jurnal dalam negeri, maupun jurnal internasional.

<sup>40</sup> Lihat tulisan kamaluddin dalam Darmawan, Yusran .ed. (2008) Menyibak Kabut di Keraton Buton (Bau-Bau: past, Present, and Future). Bau-Bau: Respect.

Analogi hancurnya sejarah bangsa Mesir itu digunakan untuk menggambarkan proses sosial yang sama sebagaimana dialami kebudayaan Buton. Peristiwa ini adalah topan badai dari jejak kesejarahan yang panjang di pentas sejarah nasional. Bagi informan ini, tragedi PKI dan pembantaian massal di Buton pada tahun 1969 adalah awal dari terpuruknya sejarah bangsa Buton sehingga telah menghilangkan satu lapis generasi intelektual (*lost of generation*) Buton sebab dihabisi dengan stigmatisasi tersebut. Ia menyebut lapis intelektual itu adalah mereka yang hendak melanjutkan sekolah dan tiba-tiba dihalangi oleh militer karena stigmatisasi tersebut. Menurut Kamaluddin, sebelum tahun 1969 itu, Buton adalah pusat pendidikan sebab pada masa itu sudah berdiri sejumlah lembaga pendidikan seperti Universitas Haluoleo (Unhol), Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), IAIN Alauddin, dan IKIP. Namun tragedi PKI itu telah memporak-porandakan seluruh peradaban yang telah dibangun sebelumnya.

....Di kota Bau-Bau saat itu sempat berjubel hingga empat Perguruan Tinggi yaitu (1) Universitas Haluoleo (Unhol), (2) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), (3) IAIN Alauddin (4) Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang. Namun sebelum semuanya tertata baik, malapetaka tiba. Buton diklaim sebagai basis Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mencapai puncaknya di tahun 1969. Tiga dari empat perguruan tinggi tersebut serta merta dipindahkan ke Kendari dan IKIP Cabang Ujung Pandang dibekukan. Sebagai eksekusi dari dahsyatnya peristiwa tersebut, masyarakat Buton menjadi carut-marut (seperti pingsannya Cleopatra),.....

Sayangnya, Kamaluddin tidak mau bercerita banyak siapa yang dituding sebagai pelaku aksi ini. Ketimbang mengurai sebab dan asal-muasal, ia lebih suka menyoroti proses-proses sosial serta dampak yang terjadi pasca kejadian tersebut, khususnya di bidang pendidikan. Dalam beberapa kesempatan, saya mendiskusikan pendapat Kamaluddin ini dengan sejumlah orang. Semuanya sama-sama sepakat bahwa peristiwa itu adalah episode yang paling kelam dalam perjalanan sejarah orang Buton. Peristiwa itu bukan saja menjadi cerita sedih para korban dan keluarganya, namun juga cerita keterpurukan sebuah bangsa yang memiliki jejak dalam sejarah Nusantara. Bahkan, seorang informan La Ode Munafi juga mengatakan hal yang sama. Baginya,

peristiwa itu telah menghancurkan kepercayaan bangsa Buton sehingga dampaknya dirasakan tidak Cuma orang Buton yang hidup pada masa itu, namun juga orang Buton yang hidup sesudahnya sampai ke masa kini.

....”Peristiwa ini telah menghancurkan rasa percaya diri semua orang Buton. Kita dihabisi dan dikuliti sama militer. Seolah orang Buton itu semua PKI. Tak hanya itu, kebudayaan Buton juga luluh-lantak karena tuduhan itu. Kita seakan mati dalam keadaan hidup...”

Kalimat *seakan mati dalam keadaan hidup* ini menunjukkan ingatannya atas kekejaman peristiwa tersebut. Satu hal yang menarik selama melakukan penelitian ini adalah informasi yang disampaikan semua informan memiliki sambungan yang jelas dan seperti halnya *puzzle*, informasi tersebut saling melengkapi. Nampaknya, ingatan atas tragedi 1969 itu adalah ingatan yang berusaha dipendam selama sekian tahun. Selama beberapa tahun, orang Buton berusaha melupakan kejadian tersebut sehingga ketika ada momentum untuk melepaskannya, maka mengalirlah beragam cerita seputar kejadian tersebut.

Hal yang juga menarik dalam kaitan *lost of generation* ini, banyak informan yang mengatakan tragedi tersebut adalah awal dari kup atau kudeta yang dilakukan militer demi menyingkirkan kader terbaik orang Buton. Pandangan yang melihat ini adalah konspirasi untuk menyingkirkan kader terbaik banyak dipegang oleh orang Buton yang saya wawancarai. Dinamika politik masa itu yang banyak menempatkan orang Buton pada posisi penting dinilai mendatangkan iri hati dan syak wasangka dari kelompok lain sehingga mulai melancarkan fitnah yang kemudian berujung kudeta di tingkat lokal. Pembahasan lebih jauh tentang kejadian itu, akan saya bahas pada bab lain dari tesis ini.

#### - **Dinamika Isu PKI di Sulawesi Tenggara**

Pertanyaan yang sering saya temukan saat membahas peristiwa di Buton adalah mengapa tidak terjadi pada tahun 1965? Bukankah, penangkapan dan pembantaian di banyak daerah justru terjadi pada tahun 1965 sebagaimana yang terjadi di Jakarta? Saya sering menemukan pertanyaan ini dikemukakan oleh para sejarawan kita. Setelah membaca berbagai data tentang kejadian tersebut, saya menyimpulkan bahwa peristiwa itu berjalan secara kronologis yang bermula dari Jakarta, kemudian berlanjut hingga ke daerah-daerah.

Saya akan mengurai secara singkat peristiwa ini secara kronologis, dengan menggunakan sejumlah bahan material sejarah, demi memasuki pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Mengurai pendekatan sejarah atas peristiwa ini sangat penting demi mengetahui bagaimana konteks kejadian yang ada pada masa kini, serta bagaimana manusia di masa kini memandang kejadian di masa lalu.

Bermula dari peristiwa di Jakarta pada tanggal 30 September 1965, setelah issue pemberontakan dewan revolusi yang diikuti dengan terbunuhnya tujuh orang jenderal Angkatan Darat, PKI dituding berada dibelakang peristiwa tersebut. Gerakan pembunuhan dan penangkapan sistematis terhadap barisan pendukung Soekarno dilakukan merata diseluruh Indonesia. Kaum komunis, kaum nasionalis bahkan kaum agamis yang mendukung Soekarno ditangkapi dan dibunuh. Jutaan orang terbunuh sia-sia, sebagian lagi hilang dan yang sedikit lebih baik namun tidak lebih beruntung, ditangkapi dan di penjarakan tanpa proses hukum yang layak. Pulau Jawa memang merupakan daerah dengan jumlah korban yang paling massif dalam tragedi kemanusiaan ini. Namun bukan berarti daerah lain tidak mengalami hal yang sama, walau dalam kuantitas yang relatif lebih sedikit, tapi persoalan kemanusiaan bukan hanya persoalan kuantitas semata tapi juga dilihat dari kualitas akibat yang ditimbulkan oleh tindakan crimes against humanity, di Sulawesi tragedi tersebut menorehkan sayatan yang tidak kalah perihnya dengan yang terjadi di Jawa.

Pada tanggal 18 Oktober 1965, penangkapan pertama terjadi di Sulawesi Tenggara, delapan orang yang dituduh Pimpinan Daerah PKI ditahan oleh aparat dari KOREM 143. Pada tanggal 28 Oktober 1965 kerusuhan *by design* mulai meletus di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, masyarakat dengan dipandu oleh beberapa ormas

dan organisasi kepemudaan mulai merusak dan mengganyangi rumah-rumah orang yang dituduh PKI dan juga terhadap instansi yang dicurigai telah disusupi oleh PKI, tidak ada jumlah pasti kerugian dan korban jiwa dalam kerusuhan itu. Kendari, Buton, Makassar, Palu dan beberapa daerah lain di Sulawesi menjadi pusat dari kerusuhan massal tersebut.<sup>41</sup>

Tahun 1968 merupakan puncak dari penangkapan terhadap orang yang dituduh PKI di Sulawesi, di Kendari tercatat lebih dari 200 orang ditahan. Karena lembaga pemasyarakatan di Kendari tidak mencukupi maka dibangunlah Rumah Tahanan Militer di Kendari. Tahun 1969 beredar issue bahwa daerah Buton sebagai pusat pasokan senjata PKI dari China, issue ini disebar oleh pihak KODAM, ratusan orang ditahan atas issue tersebut, kantor Bupati Buton ditengarai sebagai pusat operasi pemasokan senjata tersebut, puluhan staff kantor Bupati Buton ditangkapi, termasuk Kasim, Bupati Buton waktu itu yang beberapa bulan kemudian dinyatakan bunuh diri dengan menggantung diri dalam tahanan. Tahun 1969 Pangdam Wirabuana Andi Azis Rustam bersama Auditor Militer Kol. Busono dan Kol. Bagyo dari Direktorat Kehakiman Pusat mengeluarkan pernyataan bahwa di Buton tidak ditemukan senjata dan tidak ditemukan ada operasi pemasokan senjata dari China.

Dengan pernyataan itu, maka beberapa tahanan yang merupakan elit pemerintah Kabupaten Buton tetap ditahan, namun kemudian di pindahkan ke Moncongloe Makassar untuk di relokasi. Setelah penahanan massal yang dimulai tahun 1965, maka antara tahun 1968-1969 dilakukan interogasi atau screening oleh pihak yang ditugasi oleh pemerintah waktu itu, tercatat beberapa nama (tidak akan disebutkan disini) yang melakukan interogasi dengan siksaan. Tahanan yang diinterogasi dipaksa untuk mengakui apa yang tidak mereka lakukan dan selanjutnya menandatangani persetujuan atas Berita Acara Pemeriksaan, setruman, cambukan, sundutan dengan rokok, ujung jari yang dihimpit dengan meja dilakukan dalam proses interogasi tersebut.

---

<sup>41</sup> Hasil investigasi Saiful Haq, aktivis yang bekerja untuk Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) Jakarta, dan peneliti untuk Center for Security Sector Management (CSSM) UK untuk wilayah Asia.

Pada tahun 1971, menjelang Pemilu, para tahanan dari RTM Kendari dan Buton dipindahkan ke Kamp Konsentrasi Tawanan Perang di Ameroro, gelombang pertama berjumlah 156 orang dan gelombang kedua sebanyak 200 orang. Para tahanan politik ini kemudian dimanfaatkan untuk mengerjakan proyek-proyek yang berada dibawah kontrol militer, kegiatan yang di beri nama Bakti Karya dipimpin langsung oleh Letkol Ahmad Haju Kepala staff Korem 143 merangkap kepala Taperda di Sulawesi Tenggara waktu itu. Proyek pembukaan lahan hutan ribuan hektar untuk lahan transmigrasi, perintisan jalan baru di pelosok hutan Sulawesi dikerjakan oleh para Tapol tanpa upah dan logistik yang jauh dari layak, tidak sedikit yang sakit dan mati dalam proyek tersebut. Ratusan orang dipekerjakan untuk membangun berbagai infrastruktur hingga tahun 1977.

Tanggal 26 Desember 1973, sebanyak 115 orang dipekerjakan untuk membangun kota baru yang disebut Resettlement Anduonoho sekarang menjadi Kecamatan Anduonoho, proyek ini dipimpin oleh Komandan Korem 143 Kolonel DN Lintang, para Tapol diperintahkan untuk membangun dermaga Lapuko, jalan kota, membuka hutan, mempersiapkan kavling-kavling tanah dan berbagai fasilitas pendukung lainnya termasuk membangun Pusat Latihan Kerja (Puslaja) Kendari. Setelah rampung pada tahun 1977, ratusan kepala keluarga (bukan Tapol) dari pinggiran Kendari dipindahkan ke Anduonoho, mereka mendapatkan kavling tanah dan menikmati berbagai fasilitas yang telah disediakan dan dibangun oleh para Tapol, hingga kini Anduonoho berkembang sangat pesat dan menjadi pusat hunian dan denyut ekonomi di Kendari.

Sementara itu 115 orang Tapol yang telah selesai membangun Resettlement Anduonoho pada tanggal 18 Desember 1977 dipusatkan di Nanga-nanga untuk membangun lokasi untuk Tapol yang akan segera dibebaskan, mereka membuka hutan seluas  $\pm$  1000 Ha, dan mendirikan 6 Barak untuk hunian sekitar 200 orang Tapol yang pada tahun berikutnya dipindahkan ke Nanga-nanga. Di Nanga-nanga inilah lebih dari 200 orang eks Tapol kemudian menjalani hidup baru tanpa fasilitas air bersih, listrik dan jalan tanah yang buruk. Hak kepemilikan lahan ini kemudian diserahkan oleh pemerintah secara resmi kepada eks Tapol melalui beberapa surat

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan Kodam pada saat itu. Pihak International Committee of the Red Cross (ICRC) pernah berkunjung ke daerah ini pada tahun 1978 untuk melakukan audit lapangan, kawat duri yang tadinya dipasang mengelilingi wilayah ini dibuka agar tidak menyerupai kamp konsentrasi, kunjungan Palang Merah Internasional (ICRC) ini membuktikan bahwa ada dana yang turun untuk rehabilitasi Eks Tapol di Nanga-nanga, namun hingga kini tidak pernah ditemukan laporan resmi ICRC mengenai hasil audit mereka di daerah ini, baik laporan mengenai penggunaan dana maupun kelayakan hidup eks Tapol di Nanga-nanga.

Setelah lebih dari 30 tahun mereka hidup di Nanga-nanga, persoalan ternyata tidak selesai, berbagai tindakan diskriminatif masih sering mereka terima, cibiran, stigma, dan keterbatasan akses sosial politik masih membuat mereka berbeda dengan warga yang non eks tapol. Bahkan dalam dua tahun terakhir, mereka mulai diusik dengan klaim-klaim sepihak atas tanah yang telah mereka olah selama 30 tahun lebih itu. Berbagai oknum mulai mencoba menjual tanah-tanah mereka, klaim atas nama tanah adat menggugat hak legal atas tanah mereka, hal ini bukan terjadi begitu saja, tapi juga melibatkan oknum-oknum aparat desa dan pengusaha tentunya. Mencoba melawan berarti mempersiapkan diri untuk terulangnya suatu peristiwa yang jika bisa sebenarnya lebih senang mereka lupakan. Hingga kini, bersurat dan mengadu dari satu pintu birokrasi ke pintu kantor pemerintah lainnya jadi usaha yang paling aman untuk mereka lakukan, lebih dari itu? demonstrasi misalnya, itu sama saja undangan bagi maut, dari mereka yang selama ini masih memelihara hantu komunisme dalam ketakutan mistik di kepala mereka.

Berjalan melalui jalan aspal dari airport Wolter Monginsidi Kendari, menuju Konawe Selatan denyut ekonomi begitu terasa, jalur transportasi selalu merupakan prasyarat dari mobilisasi hasil produksi dan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Angin pantai berhembus lembut di dermaga Lapuko, perahu nelayan tertambat, ikan dinaikkan ke darat, dijual hingga di santap di meja makan sambil disertai perbincangan bisnis dan *handphone* keluaran terbaru, tidak ketinggalan sinetron dan infotainment di TV ikut menyegarkan perbincangan di rumah-rumah. Memasuki

Anduonoho tak pernah terpikir bahwa pada tahun 1977 masih merupakan hutan belantara, toko-toko, warung, rumah mewah dan mobil-mobil keluaran terbaru terparkir bersama keteduhan halaman yang menyiratkan keamanan hidup penghuninya. Hujan bulan Nopember turun menjelang senja, disebuah persimpangan jalan ditengah kota Kendari terpampang sebuah spanduk rentang bertuliskan “Waspada Komunisme Gaya Baru Mulai bangkit”.

Sementara itu di Nanga-nanga, daerah dimana para eks tapol di relokasi sejak tahun 1977, puluhan gubuk yang berjauhan satu sama lain, gubuk yang reot, beralaskan tanah, makan malam belum juga siap karena kayu yang dikeringkan agak basah oleh hujan sore tadi. Disinilah, di Nanga-nanga, orang-orang yang dulu merintis jalan baru sepanjang Konawe Selatan, Trans Sulawesi Tenggara, membangun dermaga Lapuko, membangun kota Anduonoho dan menyebabkan orang lain hidup bahagia diatasnya. Orang-orang ini pulalah yang hingga hari ini hidupnya terus dihantui oleh status mereka sebagai eks tapol, orang-orang yang tanahnya mulai dijual dan diserobot sedikit demi sedikit, orang yang tak henti-hentinya di beri stigma *Hantu Komunisme* yang sewaktu-waktu bisa meruntuhkan negara ini dengan tangan mereka yang tidak lebih kuat dari cengkeraman seorang balita.

Jasa mereka tak pernah dikenang, jalan yang mereka bangun puluhan tahun dengan tumpahan keringat, dermaga yang menghidupi banyak orang, kota yang dihuni oleh ratusan jiwa dengan tidur dan makan yang cukup, semua itu tidak punya arti.

### - **Dinamika Peristiwa Buton 1969**

Isyu PKI mulai berhembus di Buton pada tahun 1969 saat daerah ini dituduh sebagai basis PKI.<sup>42</sup> Berawal dari isyu yang dihembuskan tentang berlabuhnya kapal KRI Dompu yang singgah di Teluk Sampolawa dalam perjalanan dari Tanjung Priok.

---

<sup>42</sup> Ulasan yang lebih jauh tentang peristiwa ini, baca buku “*Buton Basis PKI: Sebuah Catatan Jurnalistik*” yang ditulis Saleh Hanan. Buku ini berisikan investigasi yang dilakukan sejumlah aktivis asal Buton terhadap stigma PKI yang dilekatkan pada Buton di masa silam.

Kapal ini dikabarkan mengangkut 500 pucuk senjata sebagai pasokan buat laskar PKI. Isyu ini kemudian direspon oleh pihak militer yang langsung melakukan penangkapan pada ratusan orang Buton. Berhembus informasi tentang adanya SK Keppres dan Pangkopkamtib<sup>43</sup> tentang status Buton sebagai basis PKI sehingga aparat langsung turun tangan dan menangkap banyak orang. Tanggal 21 Maret 1969, Bupati Buton Drs Muh Kasim beserta kurang lebih 40 aparat pemerintah Buton dan anggota ABRI asal Buton ditangkap tanpa surat perintah. Rumah penduduk digeledah dan banyak harta benda mereka dirampas. Ratusan warga ditangkap tanpa melalui ditanyai lebih dahulu apakah terlibat PKI ataukah tidak. Mereka memberi kesaksian adanya penyiksaan yang keji seperti dipukul, dicambuk, disetrum listrik, hingga dihimpit dengan meja.<sup>44</sup> Mereka diinterogasi setelah dipukul dengan popor senapan, kemudian dipaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa mereka terlibat dengan peristiwa tersebut.<sup>45</sup>

Stigma Buton Basis PKI adalah awal dari segala mimpi buruk itu. Sebagaimana dikatakan banyak korban, stigma ini dilancarkan pihak militer pada tahun 1969 sebagai pengejawantahan ambisi merebut kekuasaan di daerah. Dalam buku yang disunting pihak militer berjudul Data-Data dan Fakta Historis Perjuangan Kodam XIV Hasanuddin<sup>46</sup> pada halaman 9 tertulis, “*Pada bulan Maret 1969 yang lalu, telah berhasil ditangkap 35 orang pejabat di Bau-Bau antara lain Bupati KDH Dati II Buton Muh Kasim yang langsung terlibat dalam G.30.S/PKI dengan jabatan Komando Perlawanan Rakyat Sulawesi Tenggara.*” Catatan ini menjadi pengabsah bahwa apa yang terjadi di Buton melalui satu struktur yang terencana dan itu dianggap sebagai keberhasilan bagi militer.

Isu inilah yang kemudian menjadi awal dari segalanya. Posisi Kasim adalah komandan perlawanan yang dianggap mengkoordinir semua perlawanan kepada negara. Sebagai tertuduh, Kasim tidak berdaya sebab tidak pernah menjelaskan

---

<sup>43</sup> Informasi tentang adanya SK Keppres dan Pangkopkamtib ini saya dapatkan dari pernyataan mantan Ketua DPRD Buton, Ryha Madi, di Kendari Pos, 3 Agustus 2000.

<sup>44</sup> Majalah Budaya Buton *Wolio Molagi*, edisi 05/ Thn.I/ November-Desember, Kendari

<sup>45</sup> Beberapa nama yang mengalami penyiksaan massal tersebut tidak akan disebutkan di tulisan ini

<sup>46</sup> Kini Kodam hasanuddin sudah berganti nama menjadi Kodam VII Wirabuana.

posisinya melalui pengadilan. Tanpa mendengar bantahannya, militer langsung menggelandang Kasim ke penjara dan selanjutnya dibawa ke Kendari. Penangkapan itu kemudian diikuti penangkapan secara massal dan penyiksaan yang menyisahkan pengalaman traumatik korban hingga kini.

Awalnya pada pertengahan tahun 1965 Camat Sampolawa La Ode Ali Qayun melapor kepada Bupati Kasim bahwa di Pantai Sampolawa pernah singgah KRI Dompou dalam pelayarannya dari Tanjung Priok ke Maluku karena kerusakan mesin. Tak lama kemudian Ali melapor kembali bahwa diduga KRI Dompou tersebut *drop* senjata api untuk anggota PKI di Sampolawa. Isu ini kemudian direspon Bupati Kasim. Bersama anggota Muspida Buton (Kodim 1413, Polres dan kejaksaan), ia mengadakan penelitian dan pemeriksaan lapangan sampai dua kali di Sampolawa, tetapi laporan itu ternyata tidak terbukti kebenarannya.

Posisi Mayor Sadiran yang berambisi menjadi bupati ini dikisahkan oleh banyak informan. Ternyata, ia menempati posisi penting dalam ingatan kolektif orang Buton baik yang hidup pada masa tersebut, maupun yang hanya mendengarkannya dari keluarganya yang telah meninggal. Ingatan tentang ambisis Sadiran itu selalu dituding sebagai awal dari aksi militer yang dilakukannya. Ambisi Mayor Sadiran ini tampaknya didukung oleh institusi militer di Korem Haluoleo. Sebab pada pertengahan tahun 1968 Danrem 1413 Haluoleo Kolonel Inf Suparman mengundang pengurus Himpunan Pemuda Pelajar mahasiswa Indonesia Buton (HIPPMIB) di Ujung Pandang. Ia lalu menjelaskan ketidakmampuan Bupati Kasim membangun daerahnya, terutama di bidang keamanan dan sebaiknya diganti saja. Tetapi Ketua HIPPMIB EA Moh Saidi menolak rencana penggantian bupati dan menyatakan akan menyatukan seluruh mahasiswa Buton di belakang Bupati Kasim.

Gagal dengan isu tawuran serta mahasiswa, militer kembali melancarkan strategi. Upaya *me-lengser*-kan bupati tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Buton. Tetapi lagi-lagi mereka gagal total karena anggota dewan tersebut mendukung sepenuhnya seluruh kebijakan bupati, terutama dalam upaya membina perguruan tinggi di Bau-Bau. Setelah semua isu tersebut gagal, akhirnya jalan pintas kemudian dilaksanakan. Isu adanya *droping* senjata melalui KRI Dompou pada

pertengahan tahun 1965 (empat tahun sebelumnya) yang tidak terbukti kebenarannya itu diangkat kembali. Militer bersikukuh bahwa isu itu benar dan Kasim menerima senjata itu dan membagikannya kepada sejumlah anggota PKI dan aparat Pemda Buton. Tuduhan itu kemudian disampaikan kepada Kodam XIV/ Hasanuddin dan langsung diterima secara mentah-mentah oleh Asintel Kodam XIV/HN Kolonel Jamaluddin Effendi dan Pangdam Brigjen Sayidiman S. Mereka langsung menganggap laporan itu benar adanya. Maka dimulailah mimpi buruk bagi kebanyakan orang Buton tersebut.

Pada tanggal 21 Maret 1969, Bupati Kasim dan lebih dari 40 orang aparat Pemda Buton yang terdiri atas camat, lurah, kepala desa, pegawai, serta kepala dinas, hingga beberapa anggota polisi dan militer langsung ditangkap tanpa memberikan alasan. Dalam status sebagai tahanan, mereka diperiksa dan dianiaya dengan berbagai jenis penyiksaan, di luar batas perikemanusiaan untuk memaksa mereka mengakui tuduhan telah menerima *droping* senjata dari PKI yang langsung dibagi-bagikan Bupati Kasim. Sayangnya, para pemeriksa tidak dapat menunjukkan bukti kepada Laksusda Sulselra di Ujung Pandang yang sebelumnya sudah menginformasikan hal ini ke Jakarta. Dalam kebingungannya, akhirnya beberapa pucuk senjata milik Polres Buton yang dipinjamkan kepada anggota Pagarpraja untuk menjaga keamanan rumah bupati disita dan dijadikan sebagai barang bukti.

Dalam gelombang pemeriksaan yang terus berlangsung dan terdiri dari tim angkatan laut, kepolisian Sulselra, Kepala Laksusda Sulselra, Korem 143 Haluoleo dan Kodim 143 Buton, tuduhan atas *droping* senjata itu ternyata semakin kabur dan menemui jalan buntu sebab tidak menemukan bukti apapun. Dalam kekalutan tersebut, para pemeriksa terpaksa mengambil keputusan: (1) membebaskan semua unsur pegawai pemda dari tahanan dan dari tuduhan atas diri mereka. Mereka kembali bekerja aktif di kantor masing-masing. (2) Tetap menahan Bupati Kasim dan beberapa anggota Polres dan CPM yaitu Letda Pol La Ante, Pelda Pol Al Syafei, Pelda Pol La Donga, Serda CPM Ali Yunus, La Nuza (mantan Camat Mawasangka). Bukti bahwa isu tersebut adalah fitnah berupa surat tanggal 25 Desember 1969 dari Kepala Staf Kodim 1413 Buton yang ditandatangani Kapten Inf Andi Pattiroi yang

menyatakan bahwa dalam pemeriksaan mengenai senjata tersebut tidak ditemukan sesuatu apapun. Meski demikian, apalah daya sebab pada tanggal 8 Agustus 1969, Kasim telah tewas secara mengenaskan.

Meskipun studi serius tentang peristiwa ini belum pernah dihasilkan, namun peristiwa ini tidak bisa dilihat secara linear sebagaimana yang terjadi di daerah lainnya. Sejauh ini beberapa studi tentang pembantaian mereka yang dituduh PKI di daerah di antaranya adalah Hermawan Sulistiyo tentang pembantaian massal PKI di Jawa Timur, ada pula studi dari Geoffrey Robinson dan Ngurah Suryawan tentang pembantaian di Bali.<sup>47</sup> Meskipun ada sejumlah perbedaan, namun kebanyakan studi mereka melihat proses pembantaian itu sebagai efek domino atau keberlanjutan dari peristiwa di Jakarta. Kebanyakan peneliti hanya berpikir dengan alur logika dari umum ke khusus yaitu melihat Jakarta sebagai awal pemantik peristiwa dan selanjutnya daerah hanya efek bola salju dari apa yang terjadi di ibu kota. Kemudian dari sisi aktor yang terlibat, kebanyakan hanya menunjuk pihak militer baik di pusat maupun di daerah. Namun studi tentang peristiwa pembantaian PKI di Buton tidak bisa hanya dilihat dari perspektif tersebut. Justru, peristiwa ini bisa diteropong dengan melihat aspek lokal, regional, dan nasional. Dinamika lokal terkait kontestasi elite politik yang punya jejak sejarah panjang sejak masa silam, dinamika regional adalah persaingan atau kontestasi politik dengan pendatang dari selatan yaitu Bugis Makassar. Sedangkan dinamika nasional terkait peristiwa PKI yang berawal dari peristiwa tewasnya sejumlah jenderal di Jakarta pada 30 September 1965. Pada tiga ranah inilah kita bisa menafsir peristiwa yang sesungguhnya terjadi di tanah Buton.

Menurut catatan sejarah, pada tahun 1969 Direktorat Kehakiman Pusat mengeluarkan pernyataan bahwa di Buton tidak ditemukan senjata dan tidak ditemukan ada operasi pemasokan senjata dari Cina. Namun, pernyataan ini tidak menghentikan praktik kekejaman yang ada di masyarakat. Malah, tak ada rehabilitasi

---

<sup>47</sup> Semua studi tersebut telah dibukukan. Lihat Hermawan Sulistiyo (2000), *Palu Arit di Ladang tebu: Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan*, Gramedia: Jakarta. Lihat pula Geoffrey Robinson (1995), *The Dark Side of Paradise, Political Violence in Bali*, Cornell University Press. Kemudian lihat Ngurah Suryawan (2007) *Ladang Hitam di Pulau Dewa, Pembantaian Massal 1965 di Bali*, Yogyakarta: Galang Press.

terhadap nama keluarga yang sudah menjadi korban stigma PKI tersebut. Bahkan generasi muda Buton yang tidak tahu-menahu persoalan ini, ikut menerima getahnya. Mereka harus menerima getah dan konsekuensi dicurigai atau dimata-matai karena kuatnya stigmatisasi PKI ini. Banyak generasi baru yang gagal jadi pegawai negeri sipil (PNS). Banyak pula yang gagal masuk Akabri. Berdasarkan wawancara dengan seorang informan asal Buton yang menjadi dosen di Unhas, saat pertama mendaftar sebagai dosen, ia menjalani proses litsus (penelitian khusus) dan diinterogasi apakah ia mengenal Kasim ataukah tidak. Padahal, ia menjalani litsus pada tahun 1996, jauh setelah peristiwa tersebut.(\*)

